



LKPJ

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

4E9DE1D4E1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

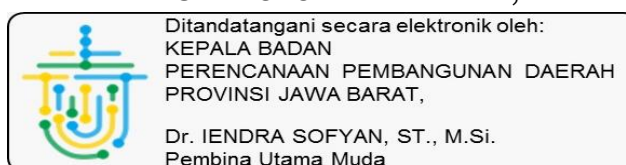
LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup LKPJ ini meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta penghargaan yang diraih pada Tahun 2023.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan telah berjalan secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diraih melalui efisiensi dan efektivitas kinerja yang dilakukan serta koordinasi, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

Demikian Dokumen LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bandung, 28 Desember 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 DASAR HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ..	11
2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	11
2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH..	13
2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	14
2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS	25
2.5 PENGHARGAAN	27
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022	29
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	33
BAB V PENUTUP.....	34



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH.....	11
TABEL 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	13
TABEL 2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	16
TABEL 2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023	25
TABEL 2.5 PENGHARGAAN YANG DIRAIH BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023	27
TABEL 3.1 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2022	30
TABEL 4.1 ANGGARAN DAN REALISASI DEKON GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (GWPP) TAHUN 2023.....	33



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran



2023, kebijakan strategis yang diprakarsai serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Bappeda fokus untuk turut berperan aktif dalam mendukung prioritas pembangunan dan menghadapi tantangan pembangunan pasca pandemi COVID-19. Oleh sebab itu dalam program-program Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini diarahkan untuk berkontribusi terhadap upaya pemulihan berbagai aspek yang terdampak pandemi COVID-19.

Selain tantangan dalam menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 itu sendiri, telah terbit perubahan kebijakan nasional melalui Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya Bappeda Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada peraturan tersebut.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan optimal. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan wujud efisiensi serta efektivitas kinerja seluruh komponen pemangku kepentingan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang tercermin dalam pencapaian target kinerja dalam kondisi pasca pandemi COVID-19.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

- Jawa Barat. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman



Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; dan
34. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2023).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan



fungsi penunjang urusan perencanaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 secara transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk mendukung pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama (IKU) daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah pada Misi Kelima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota” pada sasaran “Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih dan Akuntabel” dengan Indikator sasaran misi yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun uraian capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	A	Indeks Reformasi Birokrasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kondisi Ini dapat dimaknai bahwa Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
					Barat terus bergerak maju secara signifikan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat konsisten dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Pencapaian indikator sasaran pada misi kelima yang salah satunya ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi tercatat pada kategori A. Dengan demikian, target kategori A berhasil tercapai setelah tahun-tahun sebelumnya indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat berada dalam kategori B atau BB. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus bergerak maju secara signifikan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh serta konsisten dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Kontribusi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi memiliki peran yang dominan terutama pada aspek area penguatan akuntabilitas. Hal ini didasari bahwa tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara langsung mendukung pencapaian target kinerja pada misi kelima pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.



2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah 1.) Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi; 2.) Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. Indikator tersebut merupakan parameter keberhasilan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan. Adapun uraian Indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	[Nilai Perencanaan Strategis + Nilai Perencanaan Kinerja Tahunan (pada LKE AKIP)] / Bobot Perencanaan Kinerja * 100	Poin	25,80	25,85	Realisasi Indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi telah tercapai
2.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	$(\Sigma \text{ Program Nasional yang diakomodir dalam program pembangunan provinsi jawa barat} / \Sigma \text{ program nasional} \times 100) + (\Sigma \text{ program pada RKPD yang konsisten dengan program pada RPJMD} / \Sigma \text{ program pada RKPD} \times 100) + (\Sigma \text{ program pada RKPD Provinsi Jawa Barat yang diakomodir dalam seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah} / \Sigma \text{ program pada RKPD Provinsi Jawa Barat} \times 100)$	Persen	98,50	99,10	Tercapainya target indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat dapat dimaknai bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota dapat terwujud



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

		$100) + (\Sigma \text{ prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat} / (\Sigma \text{ prioritas pada RKPD Provinsi Jawa Barat} * \Sigma \text{ Kab/Kota se-Jawa Barat}) \times 100) / 4$				secara selaras dan bersinergi dengan sangat baik.
--	--	--	--	--	--	---

Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu terealisasi sebesar 25,85 poin dari target sebesar 25,80 poin. Untuk Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat tercatat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu tercapai sebesar 99,10 persen dari target sebesar 98,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat telah berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Tercapainya Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat dapat dimaknai bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota dapat terwujud secara selaras dan bersinergi dengan sangat baik.

Ketercapaian IKU Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatas, tidak terlepas dari hasil perumusan proses bisnis secara jelas dan terukur yang menggambarkan strategi pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU di tahun 2023.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

kinerja terhadap ketercapaian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan. Melalui telaahan terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil pengendalian yang dilakukan secara berkala serta memperhatikan isu-isu nasional dan global maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 70 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dihadapkan pada kondisi pasca pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sehingga kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa perlahan mulai dinormalisasi.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah adalah penambahan alokasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2023 dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp. 88.444.166.377 menjadi sebesar Rp. 88.220.599.105 yang diterima oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 2.3.



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi 1 Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.1	1.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; dan 2. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 47).	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	A	60.094.207.489	58.720.338.489		
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada Bappeda Provinsi Jawa Barat	Persen	80	80				
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	80	80				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	28	28	1.653.167.862	1.628.553.063		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	1.493.125.312	1.468.899.688		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	19.000.000	18.957.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	19.000.000	18.978.000		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	1	19.000.000	19.000.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	19.000.000	18.974.000		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	12	47.223.250	46.981.750		
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	36.819.300	36.762.625		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Dokumen	51	51	39.870.248.411	39.111.434.653		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	14	14	39.541.328.911	38.782.531.153		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	14	19.851.000	19.851.000		
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	50.023.500	50.023.500		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest er SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest er SKPD	Dokumen	18	18	248.145.000	248.129.000		
1	1.2	1.2.1											



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	1.2.8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	10.900.000	10.900.000			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	148.659.000	135.804.769			
	1.3.1			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	27.820.000	23.673.636			
	1.3.2			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	73.475.000	71.689.633			
	1.3.5			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	47.364.000	40.441.500			
	1.5			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Dokumen	42	42	1.258.752.500	1.180.704.242			
	1.5.1			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dokumen	1	1	226.240.000	198.407.000			
	1.5.3			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	14	14	218.110.000	217.003.542			
	1.5.4			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	139.897.500	135.146.840			
	1.5.5			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	98.007.000	96.497.770			
	1.3.9			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1	1	372.250.000	345.425.000			
	1.5.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	161.748.000	152.299.090			
	1.5.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	42.500.000	35.925.000			
	1.6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	5.990.494.214	5.827.561.587			
	1.6.1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dokumen	1	1	81.774.900	81.679.700			
	1.6.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	1	1	1.835.686.180	1.776.751.714			
	1.6.3			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dokumen	1	1	232.971.450	230.235.047			
	1.6.4			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen	1	1	497.964.834	497.827.250			
	1.6.5			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	144.207.000	143.475.000			
	1.6.6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1	2.935.993.000	2.838.630.976			
	1.6.7			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	1	1	111.100.000	110.688.000			



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.6.8			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	86.046.850	85.686.850			
	1.6.10			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	64.750.000	62.587.050			
	1.7			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	5	847.515.081	822.468.375			
	1.7.5			Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel yang Disediakan	Dokumen	5	5	847.515.081	822.468.375			
	1.8			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	14	14	6.824.352.253	6.590.213.844			
	1.8.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dokumen	12	12	1.135.617.469	1.088.611.483			
	1.8.3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	1	734.983.750	713.714.460			
	1.8.4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	1	1	4.953.751.034	4.787.887.901			
	1.9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	4	3.501.018.168	3.423.597.956			
	1.9.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen	1	1	962.500.400	962.293.256			
	1.9.6			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	1	1	260.182.000	258.186.350			
	1.9.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dokumen	1	1	2.220.249.268	2.151.078.658			
	1.9.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dokumen	1	1	58.086.500	52.039.692			
2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Tingkat kesesuaian perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	Persen	100	100	14.131.539.701	13.671.747.127			Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Perangkat Daerah melalui desk evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala melalui program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam hal terdapat perangkat daerah yang belum mampu mencapai



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1													target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	62	62	7.570.426.305	7.334.157.518			
	2.1.1			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	Dokumen	2	2	1.512.899.061	1.396.221.741			
					Jumlah Dokumen Background Study RPJPD	Dokumen	1	1					
	2.1.2			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	54	54	909.029.160	893.153.636			
	2.1.3			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	1	957.429.000	924.328.310			
	2.1.4			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1	1	57.696.000	50.196.850			
	2.1.5			Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi	Dokumen	1	1	2.214.805.472	2.200.115.550			
	2.1.6			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	Dokumen	2	2	1.918.567.612	1.870.141.431			
	2.2			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kewenangan Provinsi yang Dikelola dalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik	Dokumen	5	5	3.185.961.014	3.135.682.986			
	2.2.1			Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan (semua perencanaan pembangunan daerah)	Dokumen	1	1	1.963.679.000	1.943.866.281			
					Jumlah Dokumen Data Rencana Pembangunan	Dokumen	1	1					
	2.2.2			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	433.054.000	422.846.403			
	2.2.3			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	499.767.014	494.518.580			



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.3			Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	289.461.000	274.451.722			
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Daerah	Dokumen	19	19	3.375.152.382	3.201.906.623			
				2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5	5	538.041.982	503.714.846			
				2.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	12	12	2.600.880.400	2.475.887.702			
				2.3.3 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	2	2	236.230.000	222.304.075			
3				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	13.994.851.915	13.576.319.584			
					Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100					Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota
					Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	100					
	3.1			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	16	16	5.254.928.000	4.909.119.355			
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	400.000.000	337.787.862			
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	200.000.000	187.109.243			
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	700.000.000	667.468.349			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen Pencapaian Tujuan Pembangunan	Dokumen	1	1					



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Barat								
	3.1.5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	2	2	1.819.390.000	1.711.147.203			
	3.1.7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	200.000.000	188.526.651			
	3.1.8			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	1.935.538.000	1.817.080.047			
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Komda Lansia	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Lanjut Usia	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat menuju Jabar Zero New Stunting Tahun 2023	Dokumen	1	1					
3.2				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	16	16	3.685.669.254	3.650.392.292			
	3.2.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1	844.582.700	843.620.796			
					Jumlah Dokumen Rancangan Peta Jalan Pengembangan Perekonomian Jawa Barat Tahun 2023-2028	Dokumen	1	1					
	3.2.3			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	2	2	136.556.500	135.694.454			
	3.2.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	1.022.056.600	1.010.712.237			
					Jumlah dokumen perencanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan CSR	Dokumen	1	1					Sesuai dengan Pasal 3 Perda Jabar No.02/2013, bahwa:



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi i Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Maksud penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Penjelasan: Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan TJSL dan PKBL secara mandiri sehingga dana TJSL dan PKBL dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah adalah sinergitas program antara perusahaan dengan program pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi program berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuan fisik, karena koordinasi dilakukan melalui sistem online.
					Jumlah dokumen outlook ekonomi makro Jawa Barat	Dokumen	1	1					



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.2.5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1	1.166.776.970	1.155.790.095			
					Jumlah Dokumen Peta Jalan Pengembangan Sumber Daya Alam Jawa Barat Tahun 2023 - 2028	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)	Dokumen	1	1					
	3.2.7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	2	2	161.287.500	160.372.038			
	3.2.8			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1	354.408.984	344.202.672			
					Jumlah Dokumen sinergitas program Petani Milenial	Dokumen	1	1					
					Jumlah Dokumen sinergitas program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Dokumen	1	1					
	3.3			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	16	16	5.054.254.661	5.016.807.937			
	3.3.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	290.416.575	286.004.509			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Proyek Strategis Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1					
	3.3.3			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	362.857.200	360.790.261			
	3.3.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	728.915.582	716.849.930			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PPKP) Provinsi Jawa Barat 2023	Laporan	1	1					
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)	Laporan	1	1					
	3.3.5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang	Dokumen	1	1	417.258.435	414.348.950			



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)								
					Jumlah Dokumen Renaksi pengendalian pencemaran dan kerusakan (PPK) DAS cilamaya, dan DAS kali bekasi	Dokumen	4	4					
		3.3.7		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	340.147.010	337.201.014			
					Jumlah Laporan Money Triwulan Hasil Renaksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum	Laporan	1	1					
					Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)	Laporan	1	1					
		3.3.8		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	2.914.659.859	2.901.613.273			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	Laporan	1	1					
Jumlah									88.220.599.105	85.968.405.200			

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

2.4 Kebijakan Strategis

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya kebijakan strategis memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, pada tahun 2023 menginisiasi beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Adapun kebijakan strategis dimaksud diuraikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
2	Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Landasan untuk unsur penunjang urusan perencanaan dalam mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
3	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.	Penyesuaian Perencanaan Pembangunan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah yang adaptif dengan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			mempertimbangkan perkembangan dan situasi terkini.
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026..
5	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.	Penyesuaian program dan kegiatan untuk unsur penunjang urusan perencanaan agar dapat mendukung pencapaian target kinerja yang optimal dan adaptif terhadap perkembangan dan situasi terkini.
6	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	Landasan untuk unsur penunjang urusan perencanaan dalam mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
7	Penetapan Program Kerja dan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2023	Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 650/Kep.147-BAPP/2023 Tentang Program Kerja dan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2023	Landasan acuan program kerja dan kegiatan Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Tahun 2023.
8	Penyusunan Kegiatan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 120/Kep.955-BAPP/2023 Tentang	Daftar Kegiatan yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Barat Tahun Anggaran 2024	Kegiatan Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024	pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah.

2.5 Penghargaan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta media, telah berhasil memperoleh penghargaan yang membanggakan. Berbagai prestasi telah ditorehkan Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2023. Adapun penghargaan yang diraih sebagaimana dimaksud diuraikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penghargaan yang diraih Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1	Terbaik 3 "Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 Tingkat Provinsi"	Kementerian PPN/ Bappenas	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Jakarta 14 Juni 2023	



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
2	Penghargaan sebagai <i>"Public Private Partnership Promotor of The Year"</i>	PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Jakarta 1 Maret 2023	 



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

BAB III

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2022 disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, 27 Maret 2023 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dilakukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) II LKPJ TA 2022. Pansus II LKPJ TA 2022 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembahasan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Penugasan yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2022.

Pembahasan Pansus II LKPJ TA 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2022. Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Pansus II LKPJ, terdapat 2 (dua) rekomendasi yang ditujukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat yang telah ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2023 maupun Tahun Anggaran 2024. Adapun tindaklanjut rekomendasi dimaksud diuraikan pada tabel 3.1.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya.



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat Atas Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah yang belum mampu mencapai target.	Bappeda Provinsi Jawa Barat senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Perangkat Daerah melalui desk evaluasi pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala melalui program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam hal terdapat perangkat daerah yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan-perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik.	Tercapainya kinerja perangkat daerah di bidang pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan
2.	Sektor perencanaan pembangunan daerah agar: A. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten dan pusat dalam hal perencanaan pembangunan supaya terintegrasi. B. Mengelola dan mengalokasikan secara transparan tanggung jawab sosial perusahaan (csr) sesuai dengan peraturan daerah tentang csr.	A. Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi baik itu dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota B. Sesuai dengan Pasal 3 Perda Jabar No.02/2013, bahwa: Maksud penetapan Pedoman TJSL dan PKBL adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan	A. Tercapainya konsistensi dan integrasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. B. Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat, sesuai dengan Pasal 9 (2): bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Penjelasan: Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan TJSL dan PKBL secara mandiri sehingga dana TJSL dan PKBL dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah adalah sinergitas program antara perusahaan dengan program pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui sinkronisasi program	pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL. Tim fasilitasi CSR Jabar sebagai fasilitator tidak menerima dan mengelola aliran dana/anggaran CSR dari perusahaan, namun lebih kepada memberikan data-data terkait apa yang menjadi kebutuhan di Jawa Barat.



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		berbasis tepat sasaran bersama dan mengurangi pertemuan fisik, karena koordinasi dilakukan melalui sistem online.	



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp402,403,000 dengan realisasi Rp402,282,876 (99,97%).

Alokasi anggaran dan realisasi Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1

Anggaran dan Realisasi Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Dekon TP
1	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	402.403.000	402.282.876	99,97	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan kegiatan dekonsentrasi tidak lepas dari permasalahan/hambatan. Diantaranya adalah terkait Surat Keputusan KPA yang terlambat terbit dikarenakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) belum turun dari pusat, dan adanya pemblokiran anggaran Automatic Adjustment (AA) dikarenakan *refocusing* anggaran dari pusat. Solusi yang dilakukan dalam permasalahan AA adalah dengan melakukan penyesuaian anggaran kegiatan dengan tetap memaksimalkan kinerja dan kualitas *output*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 tidak memberikan tugas pembantuan urusan pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya (Kabupaten/Kota).



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2023 sudah selayaknya disyukuri. Keberhasilan diraih atas komitmen dan kolaborasi semua komponen pemangku kepentingan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Barat yang telah mendukung agenda-agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan kinerja perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan, dengan harapan semoga kinerja perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi masyarakat. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua untuk mewujudkan “Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.



4E9DE1D4E1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/4E9DE1D4E1>



4E9DE1D4E1